



# RENCANA KERJA TAHUN 2023



DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM  
TAHUN 2023

## **KATA PENGANTAR**

Renja Tahun 2023 merupakan dasar atau acuan untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.

Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhir kata melalui dokumen Renja ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Tim Penyusun Renja PD Tahun 2023

# Daftar Isi

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah.....	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah .....	2
1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah .....	4
1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran .....	5
1.2.3 Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya terkait Dinas Tenaga Kerja.....	7
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	7
1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	7
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2022</b> .....	<b>9</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam .....	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disnaker Kota Batam .....	23
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah .....	23
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan.....	23
2.3.3 Peluang dan Tantangan .....	25
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM</b> .....	<b>28</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	38
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam .....	39
3.3 Program Dan Kegiatan .....	41
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM</b> .....	<b>51</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>54</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

##### **1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah**

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Agar pembangunan daerah lebih terarah dan terukur maka diperlukan perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

### **1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

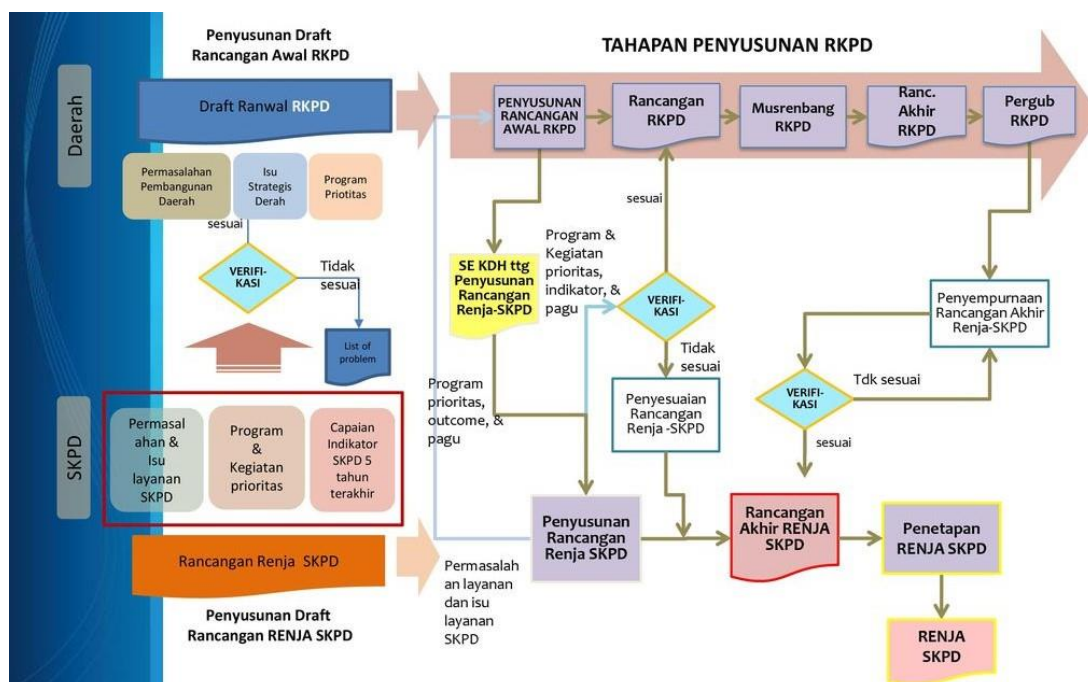
Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari persiapan penyusunan Renja, penyusunan Rancangan Renja, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang penyusunan RKPD, penyusunan Rancangan Akhir Renja dan penetapan Renja. Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1

Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

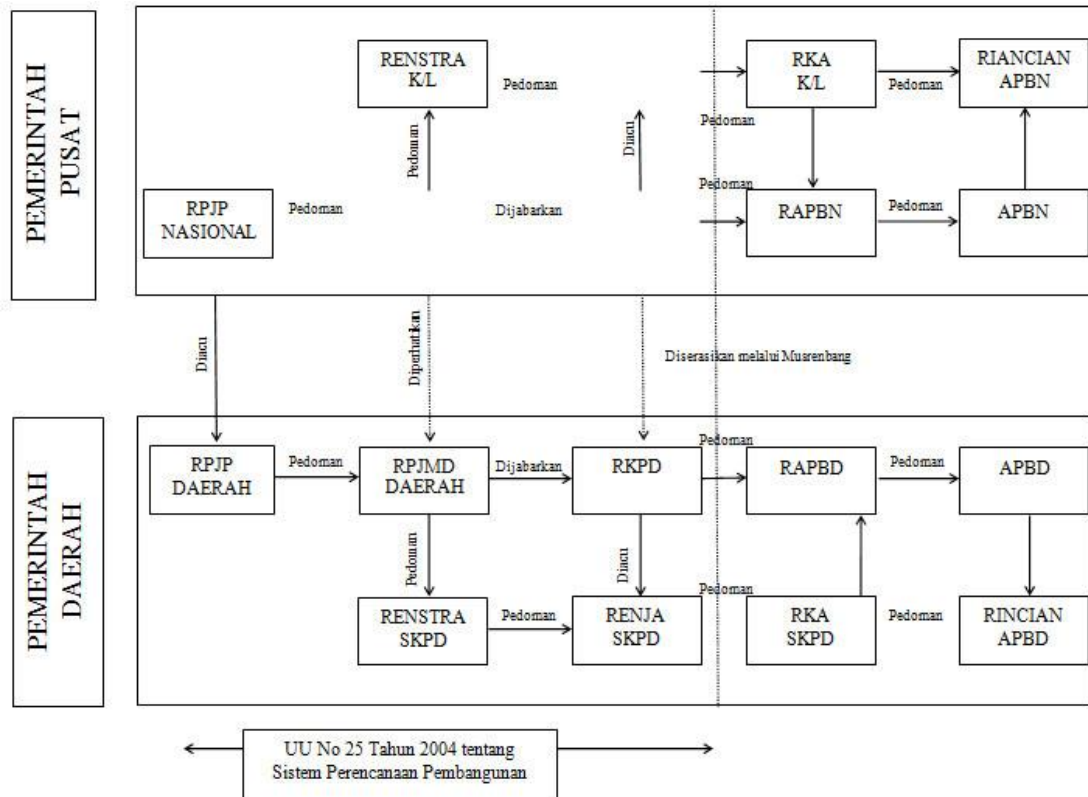


### 1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam Menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2  
Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2 Landasan Hukum

### 1.2.1 Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- c. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
- d. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 864);
- e. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

### **1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran**

Ketentuan Tentang Perencanaan Penganggaran adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
- l. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemeintah Daerah Tahun 2023;

### **1.2.3 Ketentuan Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya Terkait Dinas Tenaga Kerja**

Ketentuan Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya Terkait Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah untuk memberikan gambaran program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD.

### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2023 adalah untuk menyingkronkan dan menyinergikan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD).

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2023 adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, yaitu pengertian Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja, keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya; landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM TAHUN 2022**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja, serta program dan kegiatan.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM**

Memuat rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

### **BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM TAHUN LALU**

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana kerja pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektifitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada Tahun 2022 dan sebagai sarana perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun Anggaran 2022. Laporan ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan.

Sesuai APBD Tahun Anggaran 2022, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 26.844.187.069,- Belanja Operasi sebesar Rp. 26.745.505.069,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 98.682.000,- Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang digunakan untuk gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Pada Target Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2022 terdapat perubahan target yang semula berdasarkan KMDN 050-3708 Tahun 2020 menjadi MKDN 050-5889 Tahun 2021 seperti yang terdapat pada tabel berikut :

**TABEL 1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA**  
**DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM S.D TAHUN 2022**  
**KOTA BATAM**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>									
	Bidang Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
1 01 01	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	-	-	-	-	-	-	5 tahun	100%
1 01 01 01	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	-	-	-	5 tahun	100%
1 01 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</b>	-	-	-	-	-	-	5 tahun	100%

1 01 02 01	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	-	-	-	-	-	-	5 tahun	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	-	-	-	-	-	-	5 tahun	100%
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	-	-	-	-	-	-	5 tahun	100%
2.07.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota</b>	<b>1 tahun</b>	-	-	-	-	<b>1 tahun</b>	<b>6 bulan</b>	<b>50%</b>
2.07.01.2.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan	40 orang	-	-	-	-	40 orang (560 orang)	274 orang	49%
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	17 kegiatan	-	-	-	-	17 kegiatan (276 dokumen)	173 dokumen	63%
2.07.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	-	-	-	-	-	-	-

2.07.01.2.05.0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	159 stel	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.05.0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>6 bulan</b>	<b>50%</b>
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	-	-	-	-	5 jenis (5 paket)	5 paket	100%
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	34 jenis	-	-	-	-	40 jenis (45 paket)	38 paket	84%
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-

2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	19 jenis	-	-	-	-	13 jenis (12 paket)	9 paket	75%
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 jenis	-	-	-	-	3 jenis (20 dokumen)	12 dokumen	60%
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	30 kali	-	-	-	-	12 kali (25 laporan)	5 laporan	20%
2.07.01.2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>6 bulan</b>	<b>50%</b>
2.07.01.2.07.0	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	9 jenis	-	-	-	-	9 jenis (5 paket)	5 paket	100%
2.07.01.2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>6 bulan</b>	<b>50%</b>



2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 jenis	-	-	-	-	4 jenis (48 laporan)	36 laporan	75%
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Umum Kantor yang difasilitasi	13 orang	-	-	-	-	13 orang (169 orang)	120 orang	71%
2.07.01.2.09	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	1 tahun	-	-	-	-	5 unit	2 unit	40%
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 tahun	-	-	-	-	55 unit (31 unit)	12 unit	38.70%
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 tahun	-	-	-	-	1 tahun (1 unit)	1 unit	100%
2.07.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase data dan informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku</b>	-	-	-	-	-	<b>100 %</b>	<b>7 %</b>	<b>7%</b>

2.07.02.0.01	<b>Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun</b>	-	-	-	-	-	<b>20 Buku</b>	<b>0 Buku</b>	<b>0%</b>
2.07.02.0.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah buku Rencana Tenaga Kerja Makro Yang Disusun	-	-	-	-	-	20 Buku	0 Buku	0%
1 01 03 01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	Tersedianya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	16.38%	-	-	-	-	14%	15.12%	92%
								45%		
2.07.03.2.01	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan</b>	15%	-	-	-	-	15%	15%	100%
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	727	-	-	-	-	771 orang	0 orang	0%

2.07.03.2.01.01.0	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah pencari kerja yang direkomendasikan ke BLK	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.03.2.02	<b>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Persentase LPK yang terakreditasi</b>	<b>14%</b>	-	-	-	-	<b>14%</b>	14%	100%
1 01 03 03	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Instruktur	Terlaksananya pengembangan kelembagaan yang berkualitas	-	-	-	-	-	-	55 LPK 56 Instruktur 54 Assesor	100%
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang terakreditasi	10 LPK	-	-	-	-	10 LPK (36 Instruktur )	0 LPK (18 Instruktur )	50%
2.07.03.2.04	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan kecil yang mengikuti program konsultasi	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.03.2.04.0	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mengikuti program konsultasi	-	-	-	-	-	-	-	-
1 01 03 02	Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja	Tersedianya pelatihan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja	-	-	-	-	-	-	-	-

2.07.03.2.05	<b>Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang disertifikasi</b>	<b>0.38%</b>	-	-	-	-	<b>0.38%</b>	<b>0.38%</b>	100%
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	1000	-	-	-	-	881 orang	64 orang	7%
2.07.04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan</b>	<b>51%</b>	-	-	-	-	<b>25% (50%)</b>	50%	100%
2.07.04.2.01	<b>Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase calon TK disabilitas yang diberikan konsultasi</b>	<b>33%</b>	-	-	-	-	<b>33%</b>	33%	100%
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah calon TK disabilitas yang diberikan konsultasi	10 Orang	-	-	-	-	10 Orang	0 Orang	0%
2.07.04.2.01.04.0	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPTKS yang dimonev	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.04.2.01.04.0	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah monev yang dilakukan	-	-	-	-	-	-	-	-

2.07.04.2.03	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja</b>	<b>30%</b>	-	-	-	-	30% (25%)	<b>25%</b>	100%
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah perusahaan yang mengikuti informasi pasar kerja online	2000 perusahaan	-	-	-	-	200 Perusahaan	200 Perusahaan	100%
2.07.04.2.03.02.0	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti bursa kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.04.2.04	<b>Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan CPMI dan PMI	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah pengajuan ID CPMI yang diterbitkan	300 orang	-	-	-	-	200 Orang	0 Orang	0%
2.07.04.2.05	<b>Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perusahaan yang mendapat sosialisasi peraturan bagi TKA</b>	<b>23%</b>	-	-	-	-	<b>22%</b>	<b>22%</b>	100%

2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang memperkerjakan TKA yang mengikuti sosialisasi peraturan ketenagakerjaan	100 orang	-	-	-	-	100 Orang (1 kegiatan)	0 kegiatan	0%
2.07.05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan</b>	<b>97%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>
2.07.05.2.01	<b>Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	1. Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi; 2. Persentase peraturan perush yang disahkan oleh Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja sama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatlan sosialisasi; Persentase perjanjian kerja bersama yang didaftarkan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase data dan informasi yang disajikan dalam laporan	100%	-	-	-	-	100% (10 laporan)	4 laporan	40%

2.07.05.2.02	<b>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial</b>	94%	-	-	-	-	94%	52%	50%
2.07.05.2.02.0	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus perselisihan HI yang ditangani	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi LKS Tripartit yang diselenggarakan	10 kali	-	-	-	-	10 kali (10 LKS)	5 kali	50%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**

Untuk melaksanakan urusan wajib Bidang Ketenagakerjaan, dalam Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam merencanakan 5 (lima program) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial.

Berikut ini adalah pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2022 :



**Tabel 2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n+2	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			-	45.83%	47.09%	48.12%	-	45%	47%	47.09%	48.12%	49.15%	
1.1	Jumlah pencari kerja yang dilatih			-	727 orang	727 orang	727 orang	-	771 orang	765 orang	727 orang	727 orang	900 orang	
1.2	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi			-	1000 orang	1000 orang	1000 orang	-	881 orang	674 orang	900 orang	1000 orang	1000 orang	
2	Persentase tenaga kerja yang terserap / ditempatkan			-	25%	29%	31%	-	25%	29%	29%	31%	34%	
3	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan			-	97%	97%	98%	-	95%	95%	95%	95%	95%	
4	Persentase data dan informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku			-	100%	-	-	-	0%	-	-	-	-	

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**

### **2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah**

Urusan Ketenagakerjaan adalah salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Batam. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengacu pada tugas dan fungsi organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja, maka tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketenagakerjaan.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Keberhasilan pembangunan pada dibidang ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, pencapaian Visi dan Misi Kota Batam menjadi salah satu fokus dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD, Misi III yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan**

Kendala dan permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Skill pencari kerja yang lebih rendah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan.
2. Penyebaran informasi pasar kerja yang belum maksimal, sehingga minimnya kesempatan kerja.
3. Masih banyaknya terjadi pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan antara lain seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat berdiri suatu perusahaan, kurang terbinanya hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja di suatu perusahaan yang berdampak kepada timbulnya perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
4. Upah sektoral, Undang-Undang/Peraturan yang tidak memberikan ukuran tertentu mengenai upah sektoral dan besaran upah sektoral melalui kesepakatan yang sepenuhnya dilakukan kepada pihak pekerja dengan pengusaha.
5. Pembahasan UMK oleh Dewan Pengupahan dan kemudian diusulkan kepada Gubernur sering menimbulkan gejolak (demo pekerja) sehingga dapat mengganggu investasi.
6. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga mediator.
7. Belum tersedianya Balai Latihan Kerja.
8. Banyak angkatan kerja dari luar Batam yang akhirnya menimbulkan tingginya angka pengangguran di Kota Batam.
9. Belum adanya pendampingan terhadap wirausaha baru
10. Masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja dan peningkatan kemampuan bagi tenaga kerja yang sudah bekerja sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri khususnya Kota Batam.
2. Memberikan informasi kerja melalui Bursa Kerja dan melakukan kerjasama dengan perusahaan.
3. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan baik klasikal maupun kunjungan ke Perusahaan.
4. Melakukan kajian tentang sektor unggulan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan membuat kesepakatan antara asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja pada sektor yang bersangkutan.
5. Menetapkan struktur dan skala upah pekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yakni PP nomor 78 Tahun 2015

6. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada diklat mediator dan bimbingan teknis lainnya diluar daerah.
7. Melakukan pembangunan Balai Latihan Kerja.
8. Mengalihkan pembangunan industri ke daerah lain hingga kesempatan kerja tidak hanya bisa didapat di Kota Batam.
9. Menyediakan pendampingan bagi wirausaha baru yang telah dibentuk supaya dapat berkembang dan berfungsi sebagai penyedia/membuka lapangan pekerjaan.
10. Melakukan pembinaan terhadap Perusahaan maupun Pekerja/Buruh tentang arti pentingnya BPJS Ketenagakerjaan.

### **2.3.3 Peluang dan Tantangan**

Isu Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketenagakerjaan menjadi isu utama di era automasi dan ekonomi digital yang saat ini tengah berkembang dengan cepat. Baik peluang dan tantangan SDM dan ketenagakerjaan harus dihadapi dengan memandang kondisi terkini ketenagakerjaan Indonesia di era automasi dan ekonomi digital saat ini. Dengan melihat beberapa peluang sebagai berikut :

#### **a. Booming Ekonomi Digital dan Automasi**

Pemanfaatan teknologi di saat yang bersamaan juga menyediakan peluang terciptanya pekerjaan baru, meningkatnya produktivitas, dan mengantarkan pelayanan publik yang efektif. Selanjutnya, dinamika ekonomi terkini juga direfleksikan dengan hadirnya era automasi. Era automasi yang diperkirakan akan melahirkan revolusi industri 4.0 ini berdiri di atas tren bergesernya perekonomian dari resources-based (berbasis sumber daya) menjadi knowledge-based economy (ekonomi berbasis ilmu pengetahuan). Pergeseran terjadi seiring dengan kesadaran bahwa sumber daya alam memiliki keterbatasan sementara itu disisi lain kekayaan intelektual jika dikelola dengan optimal akan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang tidak ada batasnya. Orang-orang di negara maju mencemaskan dampak teknologi terhadap pekerjaan.

Pekerjaan yang rutin memiliki kemungkinan tinggi untuk digantikan oleh mesin. Tetapi, teknologi di saat yang bersamaan juga menyediakan peluang terciptanya pekerjaan baru, meningkatnya produktivitas, dan mengantarkan pelayanan publik yang efektif.

#### **b. Angkatan Kerja Muda (Bonus Demografi)**

Peluang pembangunan Ketenagakerjaan berikutnya adalah peningkatan penduduk usia kerja yang merupakan modal besar untuk pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah harus memperhatikan

kondisi kependudukan ini sebagai kesempatan untuk mempersiapkan para calon pekerja dan anak-anak yang akan masuk pasar kerja agar mereka menjadi sumber daya yang berkualitas tinggi, memiliki keterampilan dan kompetensi untuk menghadapi persaingan global tenaga kerja baik di tingkat ASEAN (MEA) atau di dunia.

c. Perubahan Kebutuhan Keterampilan dan Model Pembelajaran.

Sebagai konsekuensi dari tren automasi dan tuntutan untuk berinovasi, dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki spesialisasi dan keahlian yang mendalam. Di sisi lain, teknologi juga mendorong bertambahnya jenis dan jumlah pekerjaan yang sama kondisinya yaitu menuntut spesialisasi dan keahlian baru. Kebijakan ketenagakerjaan atau lebih luasnya kebijakan terkait dengan SDM harus dapat menjawab tantangan tersebut. Institusi pendidikan juga harus mulai mengubah arah orientasi kurikulum yang mampu mengimbangi dinamika tersebut. Peningkatan keahlian digital perlu diterapkan pada berbagai institusi pendidikan menengah dan Pemerintah harus memikirkan mekanisme pembiayaan yang layak. Pekerja lebih cenderung terlibat dalam pembelajaran orang dewasa [adult learning] ketika ada jaminan akan kelangsungan pendapatan dan penerimaan kembali di pasar tenaga kerja. Mengingat pentingnya training yang dilakukan di tempat kerja, perusahaan perlu berkontribusi terhadap pembiayaannya. Dalam kasus dimana perusahaan menjalankan sendiri program training-nya, mereka bisa bekerja bersama dengan organisasi pekerja untuk mendesain kerangka yang relevan. Organisasi pekerja / buruh memiliki peran utama dalam ekosistem ini.

d. Potensi Pariwisata

Di tengah kelesuan ekonomi global yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun mendatang, sebenarnya masih terbuka peluang bagi Indonesia khususnya di Kota Batam yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia untuk dapat meningkatkan kualitas perekonomiannya.

Optimisme ini salah satunya muncul dari perkembangan positif yang terjadi di sektor pariwisata Indonesia.

Terlepas dari berbagai kendala yang masih menghimpit, sektor pariwisata menjadi sektor yang semakin dapat diandalkan dalam upaya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk, serta menjadi salah satu sumber penerimaan devisa. Dukungan dan strategi kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam mengembangkan sektor ini ke depan akan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan memperbaiki

kualitas pertumbuhan ekonomi, terutama terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah. Perkembangan sektor perjalanan dan pariwisata semakin menggembirakan sejalan pemulihan ekonomi global dari krisis. Pertumbuhan sektor ini pun diperkirakan akan mengikuti bahkan akan menyamai sektor-sektor utama perekonomian dunia seperti sektor jasa keuangan maupun transportasi dan manufaktur. Keberadaan sektor pariwisata secara langsung dapat menggerakkan bisnis akomodasi, transportasi, hiburan, dan pertunjukan. Pariwisata juga membantu perkembangan industri jasa penginapan, jasa makanan dan minuman, perdagangan eceran, jasa transportasi, industri budaya, olahraga, dan jasa rekreasi.

Adapun tantangan yang harus dihadapi dengan memandang kondisi terkini ketenagakerjaan di Kota Batam di era automasi dan ekonomi digital saat ini :

a. Kualitas Angkatan Kerja

Kualifikasi tenaga kerja secara agregat yang masih rendah tentu menjadi tantangan utama bagi Dinas Tenaga Kerja dalam mengejar produktivitas industri dan juga untuk menghadapi era automasi dan revolusi industri 4.0. Transformasi ke arah automasi, ekonomi digital, dan revolusi industri 4.0 membutuhkan keseriusan dalam peningkatan kualitas SDM. Tantangan untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya angkatan kerja sangat berhubungan dengan bagaimana negara berinvestasi pada sumber daya manusianya. SDM menjadi kunci untuk dapat bersaing dalam masa depan perekonomian.

b. Tantangan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan kesempatan kerja dengan mendorong industri manufaktur tampak mengalami perbaikan. Industri manufaktur sebagai sektor yang berpotensi besar dalam menciptakan kesempatan kerja yang baik (decent job) harus diakselerasi. Terutama meningkatkan high-skilled labour. Untuk meningkatkan nilai tambah produksi yang berdampak pada diperluasnya kesempatan kerja, industri akselerasi kompetensi pekerja di sektor industri perlu dilakukan.

c. Tantangan Hubungan Industrial

Era digital dan automasi telah mengubah cara bisnis dan industri beroperasi, mengelola, serta mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki. Minim nya jumlah mediator dalam menangani perselisihan menjadi

tantangan kedepan untuk mengkader dan memberikan diklat kepada calon mediator .

d. Peningkatan Keahlian dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk menjawab tantangan keterampilan dan keahlian SDM tersebut, salah satu solusinya adalah meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja selain dengan memberikan pelatihan kerja juga menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan teknis berproduksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan bagi komunitas masyarakat sekitarnya. Dengan begitu diharapkan setelah mendapat bekal keterampilan berproduksi atau keahlian tertentu tersebut masyarakat dapat berwirausaha atau mencari kerja.

#### **2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik Tahun 2021-2024 adalah:

- a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19
- b. Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Reformasi Birokrasi;
- d. Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional;
- e. Menciptakan Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional;
- f. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- g. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- h. Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD;
- i. Pembangunan gender dan pemberdayaan kelompok difabel dan rentan;

- j. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan ketahanan iklim.

Dari beberapa isu strategis Kota Batam tersebut, yang relevan dan penting bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam penyelenggaraan layanan dasar bidang ketenagakerjaan adalah:

- a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19

Merebaknya pandemi Covid-19 beserta penanganannya menimbulkan protokol kesehatan baru yang perlu dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat serta menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sering disebut dengan normal baru. Era dimana kebiasaan-kebiasaan baru tersebut menjadi normal disebut dengan era normal baru. Pada era tersebut, kebiasaan baru tidak hanya timbul pada aktivitas masyarakat sehari-hari termasuk dalam sektor bisnis dan pemerintahan. Normal baru akan mendorong berubahnya cara berkomunikasi, interaksi, dan menjalankan bisnis bagi sebagian besar masyarakat.

- b. Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;

Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi isu strategis. Masalah daya saing tenaga kerja yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. Menghadapi pasar kerja yang fleksibel ini salah satu hal yang dapat dilakukan adalah peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja.

- c. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik.



#### **2.4 Review terhadap awal RKPD**

Program/kegiatan Tenaga Kerja Kota Batam perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja.

Berikut adalah tabel 3 review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 :

**Tabel 3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kota Batam**

**Dinas Tenaga Kerja**

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cata tan Anal isis
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>10,856,336,904</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>1. Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>10,944,865,543</b>	
	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	8,835,705,844	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	8,742,175,557	
	2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administraasi Umum Perangkat Daerah	100%	385,714,500	2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	363,982,381	
						3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	380,974,945	
	3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	356,280,000	4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuh	100%	238,636,100	
	4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	847,896,560	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	100%	804,246,560	

						Pemerintahan Daerah	pemerintahan daerah			
	5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	430,740,000	6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	414,850,000	
<b>III</b>	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>16.38%</b>	<b>15,517,351,006</b>	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>- Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>16.38%</b>	<b>17,772,816,782</b>
	6. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	15%	7,631,286,500	7. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	15%	8,347,622,397
	7. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase LPK yang terakreditasi	14%	432,150,000	8. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase LPK yang terakreditasi	14%	432.150.000
	8. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tenaga kerja yang disertifikasi	16,38%	7,453,914,506	9. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tenaga kerja yang disertifikasi	0.38%	8,993,044,385
	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan</b>	<b>51%</b>	<b>491,722,300</b>	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan</b>	<b>51%</b>	<b>492,214,389</b>
	9. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase calon TK disabilitas yang diberikan konsultasi	33%	81,764,000	10. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase calon TK disabilitas yang diberikan konsultasi	33%	81,756,389
	10. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	30%	221,907,800	11. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	30%	221,908,000
	11. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI (kecamatan) - %	100%	103,648,500	12. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI	100%	103,685,000
	12. Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi		Persentase perusahaan yang	23%	84,402,000	13. Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang		Persentase perusahaan yang mendapat	23%	84,865,000

	Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		mendapat sosialisasi peraturan bagi TKA			Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		sosialisasi peraturan bagi TKA			
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Hubungan Industrial yang Harmonis</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Perselisihan Pengusaha Pekerja Per Tahun</b>	<b>97 %</b>	<b>384,154,700</b>	<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan</b>	<b>97%</b>	<b>146,068,762</b>	
	13.Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan	100%	143,573,500	14.Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota		Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan	100%	67,449,039	
	14.Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rapat koordinasi LKS Tripartit yang diselenggarakan	10 Lembaga	240,581,200	15.Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Persentase data dan informasi yang disajikan dalam laporan	100%	66,831,831	
						16.Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	94%	78,619,723	
						17.Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rapat koordinasi LKS Tripartit yang diselenggarakan	10 Kali	78,619,723	
						<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>Kota Batam</b>	<b>Persentase data dan informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku</b>	-	-	
						18.Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	-	-	
<b>T O T A L</b>					<b>27,249,564,910</b>	<b>T O T A L</b>					<b>29,355,965,476</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan kepada pemerintah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun secara langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Kota Batam akan memperhatikan usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat baik melalui Musrenbang maupun yang disampaikan langsung kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

**TABEL 4**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI**  
**PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023**  
**KOTA BATAM**

**Nama Perangkat Daerah : DINAS TENAGA KERJA**

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pelatihan Accounting Level 1	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	17	Pokir Dewan
2	Pelatihan dan Sertifikasi Las 5 G (PIPE) SMAW	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	12	Pokir Dewan
3	Pelatihan Dasar K3 Muda	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	22	Pokir Dewan
4	Pelatihan HRD Pariwisata	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
5	Pelatihan Jasa Boga (Bakery)	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
6	Pelatihan Jasa Boga Kue Nasional	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	35	Pokir Dewan
7	Pelatihan Jasa Boga (Pasty)	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	22	Pokir Dewan

8	Pelatihan Menjahit Asisten Pembuat Pakaian Level 1	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	26	Pokir Dewan
9	Pelatihan Menjahit Garmen	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	25	Pokir Dewan
10	Pelatihan Menjahit Pola Tingkat Dasar	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	40	Pokir Dewan
11	Pelatihan Operator Komputer	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	23	Pokir Dewan
12	Pelatihan Teknik Pendingin	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	17	Pokir Dewan
13	Pelatihan Auto Cad Muda	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	10	Pokir Dewan
14	Pelatihan SSW Bahasa Jepang Industri Perhotelan dan Restoran Jepang	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	10	Pokir Dewan
15	Pelatihan Bahasa Mandarin dan Sertifikasi Worker ke Taiwan	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	10	Pokir Dewan
16	Pelatihan Bahasa Mandarin dan Sertifikasi Domestik Helper ke Taiwan	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	10	Pokir Dewan
17	Pelatihan Tata Rias Pengantin	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	18	Pokir Dewan
18	Pelatihan Basic Safety Training (BST) Pelaut	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	70	Pokir Dewan
19	Pelatihan Scaffolding	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
20	Pelatihan Tanaman Sayur Hydroponik	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	30	Pokir Dewan
21	Pelatihan Tata Rias Salon Kecantikan	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	18	Pokir Dewan
22	Pelatihan Welder 3G/4G	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	18	Pokir Dewan
23	Pelatihan Welder 5G/6G	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	15	Pokir Dewan

24	Pelatihan Instalasi Water Treatment	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	20	Pokir Dewan
25	Bimtek dan Sertifikasi AK3 Umum	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	21	Pokir Dewan
26	Bimtek dan Sertifikasi Barista	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	17	Pokir Dewan
27	Bimtek dan Sertifikasi K3 Operator Scaffolding	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	20	Pokir Dewan
28	Bimtek dan Sertifikasi Pengelolaan Hubungan Industrial	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	20	Pokir Dewan
29	Bimtek dan Sertifikasi Pengukuran Produktivitas	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	20	Pokir Dewan
30	Bimtek dan Sertifikasi Security Pratama	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	18	Pokir Dewan
31	Bimtek dan Sertifikasi UMKM	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	20	Pokir Dewan
32	Bimtek dan Sertifikasi Web Development - Programming	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	22	Pokir Dewan
33	Bimtek dan Sertifikasi Welder 6G FCAW	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	11	Pokir Dewan
34	Bimtek dan Sertifikasi Welder 6G SMAW	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	22	Pokir Dewan
35	Bimtek dan Sertifikasi Scaffolding	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	22	Pokir Dewan
36	Bimtek dan Sertifikasi Welder 3G SMAW	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	14	Pokir Dewan
37	Bimtek dan Sertifikasi Tour Guide	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	30	Pokir Dewan
38	Bimtek dan Sertifikasi Instruktur Level 4	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	20	Pokir Dewan
39	Bimtek dan Sertifikasi Front Office Supervisor	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	22	Pokir Dewan

40	Bimtek dan Sertifikasi Perselisihan Hubungan Industrial	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	23	Pokir Dewan
41	Bimtek dan Sertifikasi Supir Bus Pariwisata	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	22	Pokir Dewan
42	Bimtek dan Sertifikasi Barbermen	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	10	Pokir Dewan
43	Bimtek dan Sertifikasi SPA Terapis	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	18	Pokir Dewan
44	Bimtek dan Sertifikasi Food and Beverage Produkt (Bakery)	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	20	Pokir Dewan



**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "**Indonesia yang mandiri, adil dan makmur**".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
- 2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk

pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.

3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

4) RPJMN ke-4 (2020–2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Oleh karena itu, tema RPJM 2020-2024 adalah "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan" yang dituangkan ke dalam 7 misi atau agenda pembangunan. Ketujuh agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan Dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Terdapat 5 (lima) misi Kota Batam Tahun 2021 – 2026 dimana yang terkait dengan Ketenagakerjaan adalah Misi ke – 3 yaitu :

Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia, dengan tujuan mewujudkan pembangunan manusia yang unggul dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan sasaran yaitu *Menurunnya angka pengangguran*. Hal ini sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam mendukung tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang bisa dilihat pada Tabel 6 berikut.

**Tabel. 6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kota Batam		Tingkat Pengangguran Terbuka	11%	10%	9%	8%	7%	6%
		Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Persentase Penurunan jumlah pengangguran	11%	10%	9%	8%	7%	6%
			Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	95%	96%	97%	98%	99%	100%

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 tersebut, dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif berupa upaya kebijakan, strategis dan program pembangunan ketenagakerjaan dengan melihat kepada isu – isu strategis Pembangunan Ketenagakerjaan yaitu :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM melalui kompetensi kerja, produktivitas kerja, disiplin, sikap dan etos kerja kepada seluruh angkatan kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan oleh pembangunan di Kota Batam.
2. Mewujudkan perluasan kesempatan kerja yang menggambarkan ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai/layak bagi seluruh angkatan kerja.
3. Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dalam mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha

4. Mewujudkan kesejahteraan para buruh/pekerja/karyawan dan keluarganya melalui sistem pengupahan yang berkeadilan dan layak
5. Peningkatan efektifitas peran perencanaan tenaga kerja yang merupakan guidance dalam pemecahan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di masa yang akan datang sehingga mampu mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan kepada tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan dan agenda SDGs.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Melihat dari isu – isu strategis Pembangunan Ketenagakerjaan seperti yang telah diuraikan diatas, didapatlah kebijakan pemecahan masalah ketenagakerjaan berdasarkan skala prioritas yang dituang dalam program, kegiatan dan subkegiatan. Strategi pemecahan permasalahan masalah ketenagakerjaan tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan efektifitas peran perencanaan tenaga kerja yang merupakan guidance dalam pemecahan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di masa yang akan datang sehingga mampu mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan kepada tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan dan agenda SDGs.
2. Memberdayakan dan mendayagunakan angkatan kerja secara optimal dan manusiawi.
3. Mewujudkan kesempatan kerja yang menggambarkan ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai/layak bagi seluruh angkatan kerja.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas kerja, disiplin, sikap dan etos kerja kepada seluruh angkatan kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan

jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan oleh pembangunan daerah.

5. Produktivitas tenaga kerja yang menggambarkan tenaga kerja daerah dalam menghasilkan barang dan jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi.
6. Efektifitas hubungan industrial dalam mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha (industrial peace) sehingga dapat mendorong produktifitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja.
7. Mewujudkan kesejahteraan para buruh/pekerja/karyawan dan keluarganya melalui sistem pengupahan yang berkeadilan dan layak.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel;
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
  - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
- 2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
- 3) Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
- Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
- 4) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja
- 1) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
- 2) Kegiatan Pengelolaan Informasi
    - Job Fair/ Bursa Kerja
    - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
  - 3) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
    - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
    - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
  - 4) Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

d. Program Hubungan Industrial

- 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
  - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
- 2) Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Perencanaan Tenaga Kerja

- 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
  - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

Dalam Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dibandingkan dengan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2023 yang bisa dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8 berikut terdapat perbedaan pagu yang cukup signifikan, dimana

hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana APBD dan Perubahan pada Regulasi IMTA terbaru yaitu Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2023 adalah berikut:



**Tabel 7**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.07.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Batam	1 Tahun	<b>10,944,865,543</b>		1 Tahun	<b>11.334.502.756</b>
2.07.01.2.02	<b>1.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	8,742,175,557		100%	9,020,521,520
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		49 orang/bulan	8,703,165,557		40 orang/bulan	8.917.551.520
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		17 Dokumen	39,010,000		17 Dokumen	102.970.000
2.07.01.2.05	<b>2.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	363,982,381		100%	363,982,381
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		159 Paket	363,982,381		159 Paket	363,982,381

<b>2.07.01.2.06</b>	<b>3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	380,974,945		100%	492,266,195
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 Paket	5,627,000		4 Paket	5,627,000
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		40 Paket	115,546,695		34 Paket	115.546.695
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		19 Paket	104,091,250		19 Paket	208.182.500
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 Dokumen	3,600,000		3 Dokumen	10.800.000
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Laporan	152,110,000		30 Laporan	152.110.000
<b>2.07.01.2.07</b>	<b>4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100%	238,636,100		100%	238,636,100
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9 Unit	238,636,100		9 Unit	238.636.100
<b>2.07.01.2.08</b>	<b>5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	804,246,560		100%	804,246,560
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 Laporan	254,961,600		4 Laporan	254.961.600
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	549,284,960		13 Laporan	549.284.960

2.07.01.2.09	<b>6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100%	414,850,000		100%	414,850,000
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5 unit	178,510,000		5 unit	178.510.000
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		55 unit	36,340,000		55 unit	36.340.000
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	200,000,000		1 Unit	200.000.000
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi		16.38%	<b>17.772.816.782</b>		18.32%	<b>18,405,529,059</b>
<b>2.07.03.2.01</b>	<b>7.Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan		15%	8,347,622,397		15%	8,347,622,397
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		900 orang	8,347,622,397		727 orang	8.347.622.397
<b>2.07.03.2.02</b>	<b>8.Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	Persentase LPK yang terakreditasi		14%	432,150,000		14%	432,150,000
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		10 Lembaga	432,150,000		10 Lembaga	432.150.000
<b>2.07.03.2.05</b>	<b>10.Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase tenaga kerja yang disertifikasi		0.38%	8,993,044,385		0.38%	9,625,756,662
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		1000 Dokumen	8,993,044,385		1000 Dokumen	9.625.756.662

<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase tenaga kerja yang terserap/ditempat		<b>51%</b>	<b>492,214,389</b>		<b>52%</b>	<b>509,737,221</b>
2.07.04.2.01	<b>11.Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase calon TK disabilitas yang diberikan konsultasi		33%	81,756,389		33%	99,279,221
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		10 orang	81,756,389		10 orang	99.279.221
<b>2.07.04.2.03</b>	<b>12.Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja		30%	221,908,000		30%	221,908,000
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		200 Orang	221,908,000		200 Orang	221.908.000
<b>2.07.04.2.04</b>	<b>13.Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI		100%	103,685,000		100%	103,685,000
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah Ditangani		200 Orang	103,685,000		300 Orang	103.685.000
<b>2.07.04.2.05</b>	<b>14.Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase perusahaan yang mendapat sosialisasi peraturan bagi TKA		23%	84,865,000		24%	84,865,000
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Peanjangkan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peanjangkan IMTA yang dilaksanakan		100 Orang	84,865,000		100 Orang	84.865.000
<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan</b>		<b>97%</b>	<b>146,068,762</b>		<b>98%</b>	<b>151,268,810</b>
<b>2.07.05.2.01</b>	<b>15.Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan		100%	67,449,039		100%	69,431,822

2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		100 Laporan	66,831,831		100 Laporan	69.431.822
<b>2.07.05.2.02</b>	<b>16.Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial		94%	78,619,723		94%	81,836,988
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartif yang Dibina		10 Lembaga	78,619,723		10 Lembaga	81,836,988
					<b>29,355,965,476</b>			<b>30,401,037,846</b>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM**

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam**  
**Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah</b>	Batam	1 Tahun	<b>10,856,336,904</b>	
2.07.01.2.02	<b>1.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	8,746,365,844	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		49 orang/bulan	8,680,845,844	
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		17 Dokumen	65,520,000	
2.07.01.2.05	<b>2.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	89,340,000	
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		159 Paket	89,340,000	
2.07.01.2.06	<b>3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	<b>385,714,500</b>	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 Paket	5,621,000.00	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		40 Paket	115,532,500.00	

2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		19 Paket	108,942,000.00	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 Dokumen	3,600,000.00	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Laporan	152,019,000.00	
<b>2.07.01.2.07</b>	<b>4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100%	<b>356,280,000</b>	
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9 Unit	356,280,000	
<b>2.07.01.2.08</b>	<b>5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	<b>847,896,560.00</b>	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 Laporan	284,961,600.00	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	562,934,960.00	
<b>2.07.01.2.09</b>	<b>6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100%	<b>430,740,000.00</b>	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5 unit	178,510,000.00	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		55 unit	59,230,000.00	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	193,000,000	
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi		16.38%	<b>15,517,351,006</b>	

2.07.03.2.01	<b>7.Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	15%	<b>7,631,286,500</b>	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	900 orang	7,631,286,500	
2.07.03.2.02	<b>8.Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	Persentase LPK yang terakreditasi	14%	<b>432,150,000</b>	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	432,150,000	
2.07.03.2.05	<b>10.Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase tenaga kerja yang disertifikasi	0.38%	<b>7,453,914,506</b>	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1000 Dokumen	7,453,914,506	
2.07.04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase tenaga kerja yang terserap/ditempat	<b>51%</b>	<b>491,722,300</b>	
2.07.04.2.01	<b>11.Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase calon TK disabilitas yang diberikan konsultansi	33%	<b>81,764,000</b>	
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	10 orang	81,764,000	
2.07.04.2.03	<b>12.Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	30%	<b>221,907,800</b>	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2000 Orang	221,907,800	
2.07.04.2.04	<b>13.Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI	100%	<b>103,648,500</b>	
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah Ditangani	200 Orang	103,648,500	
2.07.04.2.05	<b>14.Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase perusahaan yang mendapat sosialisasi peraturan bagi TKA	23%	<b>84,402,000</b>	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Peanjangkan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peanjangkan IMTA yang dilaksanakan	100 Orang	84,402,000	



2.07.05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan</b>		97%	384,154,700	
2.07.05.2.01	<b>15.Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan		100%	143,573,500	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		10 Laporan	143,573,500	
672.07.05.2.02	<b>16.Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial		94%	240,581,200	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		10 Lembaga	240,581,200	
					<b>27,249,564,910</b>	

## **BAB V PENUTUP**

Rancangan Akhir Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2023 ini merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang disingkat RKA Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Oleh karena itu pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Renja Tahun 2023 ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam APBD, sehingga apabila di kemudian hari terjadi defisit anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian target kinerja dengan kemampuan anggaran yang ada.

Renja Tahun 2023 ini hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian Rancangan Akhir Renja Tahun 2023 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2023.

Batam, 22 Juli 2022  
**Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kota Batam**



**Rudi Sakyakirti, SH., MH**  
**NIP.19650606 199303 1 018**